

**PROSPEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA TUMIYANG KABUPATEN
BANYUMAS (Studi Evaluasi Implementasi Program P2MPD)
*PROSPECT OF WOMEN EMPOWERMENT IN TUMIYANG VILLAGE OF
BANYUMAS REGENCY (Evaluation Study of The Implementation P2MPD
Program)***

Oleh:

Alizar Isna dan Syah Firdaus

Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik FISIP UNSOED

(Diterima: 18 Maret 2004, disetujui: 29 Maret 2004)

ABSTRAK

Perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisipasi perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran, tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Pada tahapan selanjutnya partisipasi perempuan telah dilandasi keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di antara para pelaksana program; mekanisme yang “memaksa” perempuan berpartisipasi sebagai anggota Tim Sembilan; masih besar peran aparatur desa dan pelaksana program; Program lebih berorientasi pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa; kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program P2MPD. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Tim Sembilan dan pelaksanaan program P2MPD; anggota perempuan Tim Sembilan mempunyai kemauan untuk belajar.

Kata kunci : Partisipasi, pemberdayaan, perempuan

ABSTRACT

The women had shown their active participation on every steps of P2MPD program activity. The participation was not started by awareness of the participators, nevertheless, the women obeyed any rules given by the programs and the implemeters. In the later steps, the participation of those women had been based on their willingness to learn and fulfill the elector trust. The inhibiting factors in the women empowering process were that there had not been commitment among in the implementers of the program, the “forcing mechanism” toward the women to participate on the Tim Sembilan, big intervention of local (village) decision makers and the program implementers, the program which was oriented more on the physical aspects, elite organization and personal oriented of the village, the lack of supports of the family toward the participation of those women on the Tim Sembilan and P2MPD Program activities. Meanwhile the supporting factors are the discipline in the women empowering on the program was able to support the participation of the women in Tim Sembilan and the implementation of P2MPD Program. In brief the Tim Sembilan female members was able to grow their willingness to learn.

Keywords : Empowerment, participation, women

PENDAHULUAN

Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hal tersebut nampak pada value (nilai) yang terkandung dalam beberapa kebijakan publik, di antaranya Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD). Hal tersebut setidaknya nampak pada sifat Program P2MPD, tujuan Program P2MPD, dan prinsip dasar Program P2MPD (Bappenas, 2001). Nilai tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sifat kebijakan publik, sejak dahulu tidak pernah bebas nilai (value free) atau tanpa nilai (valueness) melainkan sarat nilai (valueloaded) (lihat Wahab, 2002).

Salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan Program P2MPD adalah Desa Tumiyang. Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut, diketahui bahwa pertama, telah dibentuk Tim Inti yang berjumlah sembilan orang, yang dipilih secara demokratis, jujur, dan terbuka. Tim Sembilan, terdiri dari lima orang laki-laki dan empat orang perempuan, dengan pembagian tugas: (a) Tim Pelaksana: Rahmat, sebagai ketua; Sidik N, Ny. Sri Murdiningsih, Dartam, Ny. Agus Indriyati, sebagai anggota; (b) Tim Monitoring dan Evaluasi: Darmo, sebagai ketua; Ny. Dasilah, sebagai anggota; dan (c) Tim Operasi dan

Pemeliharaan: Karto, sebagai ketua; Ny. Kasiyah, sebagai anggota; Kedua, telah berhasil melaksanakan: (a) rehab TK dan Penambahan Lokal di RT 03 RW I, ditambah pengaspalan sepanjang 400 m, dengan total anggaran Rp 35.757.064,00; (b) Pengaspalan jalan RT 01 RW II dan RT 01, RT 03 RW III. Pengaspalan dan pembuatan bronjong, target 1200 m² dengan total anggaran Rp 36.916.996,00; Ketiga, digambarkan peran dan partisipasi perempuan, meliputi: jumlah perempuan yang terlibat dalam penyelesaian pekerjaan dengan jumlah HOK 243 (30,97 persen) serta secara bergantian dan suka rela menyediakan makanan dan minuman untuk para tenaga kerja; keterlibatan warga miskin dan kaum perempuan dapat dimaksimalkan sehingga langsung tidak langsung manfaat P2MPD dapat dirasakan oleh mereka; kaum perempuan ternyata mempunyai andil dan peran yang cukup besar serta mampu melaksanakan peran sertanya dalam pembangunan (Makalah Lokakarya Desa Tumiyang, 2003).

Ber gayutan dengan pelaksanaan program P2MPD di Desa Tumiyang, menarik untuk dikaji proses dan prospek pemberdayaan perempuan di desa tersebut, dengan cara melakukan evaluasi implementasi Program P2MPD. Ketertarikan dan pentingnya dikaji permasalahan tersebut, setidaknya didasari atas beberapa alasan. Pertama, bagaimanapun juga keberhasilan

desa, dan Tim Sembilan sendiri. Oleh karena itulah, keberhasilan tersebut masih perlu untuk dibuktikan. Kedua, keterlibatan perempuan dalam Tim Sembilan sedikit banyak karena keharusan dan “paksaan” KMD. Hal tersebut terungkap dalam lokakarya, dimana konsultan/ahli pemberdayaan masyarakat mengharuskan separuh dari Tim Inti adalah perempuan. Keharusan ini, kontradiktif dengan konsep kelompok sebagai media pemberdayaan. Kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif; akan tetapi penting untuk menghindari pembentukan kelompok yang dipaksakan (Moeljarto, 1996). Ketiga, secara teoritis disebutkan bahwa untuk keadaan Indonesia, tiga strategi meningkatkan partisipasi perempuan sebagaimana yang dikemukakan McCarthy, diperluas menjadi sembilan model strategi partisipasi perempuan dalam organisasi yang merupakan kondisi atau syarat pendukung untuk dapat memberdayakan perempuan. Salah satu di antara sembilan model strategi tersebut adalah emansipasi. Bahwa perempuan bekerja dan berjuang bersama laki-laki dalam organisasi (orsospol, ormas, ornop), lembaga atau yayasan, koperasi atau usaha bersama, merupakan sarana penting yang dapat membantu memberdayakan perempuan. Akan tetapi, hal ini masih memerlukan penelitian sejauh

mana perempuan ikut berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi, menyusun agenda kegiatan, dan mengambil keputusan (Priyono, 1996). Kasus Tim Sembilan di Desa Tumiyang dengan empat anggotanya adalah perempuan, termasuk ketua tim, dapat menjadi wahana untuk mewujudkan “amanah” Priyono dan akan dapat memperkaya studi tentang pemberdayaan perempuan, yakni dengan cara mengkaji partisipasi perempuan dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga dapat diperoleh gambaran sejauhmana perempuan ikut berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi, menyusun agenda kegiatan, dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan Program P2MPD.

Secara rinci masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan Program P2MPD di Desa Tumiyang ?; mengapa perempuan Desa Tumiyang bersedia untuk terlibat dalam Tim Sembilan dan pelaksanaan Program P2MPD ?; faktor-faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui dalam proses pemberdayaan perempuan di desa tersebut ?

Sesuai dengan masalah yang ingin dikaji, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan Program P2MPD di Desa Tumiyang, menjelaskan alasan-alasan perempuan Desa Tumiyang terlibat dalam Tim

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini memfokuskan pada proses dan prospek pemberdayaan perempuan di Desa Tumiyang Kabupaten Banyumas. Secara lebih rinci fokus penelitian meliputi: partisipasi perempuan pada setiap tahapan pelaksanaan Program P2MPD di Desa Tumiyang, alasan yang mendasari para perempuan Desa Tumiyang terlibat dalam Tim Sembilan dan pelaksanaan Program P2MPD, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan perempuan di Desa Tumiyang. Agar dapat diperoleh gambaran yang mendalam, digunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang (Yin, 1987).

Lokasi penelitian di Desa Tumiyang, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan awal dipilih secara purposive, dan informan selanjutnya menggunakan teknik snow-ball. Analisis data menggunakan model analisis interaktif, seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984). Untuk menetapkan keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian (Lincoln dan Guba, 1985; Nasution, 1988; dan Moleong, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Ringkas Kondisi Umum Desa Tumiyang

Desa Tumiyang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Desa yang memiliki luas wilayah 475.375 Ha dan terbagi atas tiga Dukuh atau Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT) ini, terletak tidak terlalu jauh dari ibu kota Kecamatan Kebasen maupun ibu kota Kabupaten Banyumas (Purwokerto). Transportasi menuju ke Desa Tumiyang relatif mudah, karena dapat dijangkau dengan minibus atau Koperades.

Penduduk Desa Tumiyang berjumlah 1.519 jiwa, terdiri dari laki-laki 772 jiwa, perempuan 747 jiwa, dan terdiri dari 365 KK. Desa Tumiyang mempunyai sarana dan prasarana umum yang cukup lengkap seperti sarana peribadatan (dua Masjid, tiga Musholla, satu Gereja, dan satu Pura atau Danawarih), sarana pendidikan (satu Gedung TK dan SD), sarana olah raga dan kesenian (lapangan olah raga dan satu gedung kesenian).

Desa Tumiyang memiliki kelembagaan dan organisasi desa yang berfungsi untuk membantu kelancaran dan keberlangsungan jalannya pemerintahan desa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: LKMD (jumlah anggota 35 orang), BPD (jumlah anggota delapan orang), dan PKK (jumlah tim penggerak 21 orang dan jumlah kader 34 orang).

Gambaran Partisipasi Perempuan Serta Alasan Terlibat Dalam Tim

Matrik 1. Tahapan Kegiatan Program P2MPD, Peserta, Peran Perempuan, dan Alasan Perempuan Terlibat Dalam Tahapan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Peserta	Peran Perempuan	Alasan
1.	Sosialisasi di Balai Desa Tumiyang; Sosialisasi melalui pertemuan RT	Pengurus RT, tokoh masyarakat & org. massa. Harus ada perwakilan perempuan; anggota tiap-tiap RT	Sebagai peserta, memberikan masukan	Sesuai dengan ketentuan program dan pelaksana
2.	Pembentukan Tim Sembilan; Ketua: Ny Sri M, Sekre: Darmo, Bendahara: Ny Dasilah; Anggota: Sidik, Rahmat, Ny Agus I., Ny Kasiyah, Dartam, dan Eko	Perwakilan dari RT minimal lima: pengurus, tokoh masyarakat dan organisasi massa; harus ada tokoh perempuan terutama PKK; 1 RT tidak mewakilkan, calon 20 orang	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi calon anggota Tim Sembilan Berkesempatan untuk mengeluarkan pendapat mengenai permasalahan prasarana dan sarana dasar yang ada di Desa Tumiyang 	Sesuai ketentuan program., Diharuskan oleh pelaksana, dicalonkan oleh RT
3.	Pembekalan Tim Sembilan	Anggota Tim Sembilan	Sebagai peserta	Ketentuan program & pelaksana
4.	Tim Sembilan melakukan survai untuk memperoleh masukan dari masyarakat; Membuat peta desa atau wilayah yang akan dikunjungi, dengan kriteria paling banyak orang miskin dan perempuan	Tim Sembilan dengan fasilitator desa (sesuai ketentuan program)	Tim Sembilan : terlibat dalam pembuatan kategorisasi masyarakat, peta desa, dan survai Masyarakat : memberikan usulan kegiatan berupa : Pengairan kalijati, air bersih, irigasi Kali Loning, sarana MCK (laki-laki); pengerasan jalan lapangan, pengerasan jalan reboisasi, rehabilitasi TK (perempuan)	<p>Sesuai dengan tugas Tim Sembilan</p> <p>Kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan</p>
5.	Lokakarya I, 2 Oktober 2002 di Balai Desa : pembagian tugas Tim Sembilan, mengenal & mengumpulkan masalah, menampung & mengumpulkan usulan kegiatan	Tim Sembilan, fasilitator desa, perangkat desa, BPD, dan LKMD	Terlibat dalam : Pembagian tugas di antara anggota Tim Sembilan, sebagai: Tim Pelaksana, Monitoring dan Evaluasi, Operasi dan Pemeliharaan Proses perumusan : Pengairan kalijati, air bersih, pengerasan jalan lapangan, pengerasan jln reboisasi, irigasi Kali Loning, sarana MCK, rehab TK	Tugas Tim Sembilan; belajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dukungan masyarakat

No.	Tahapan Kegiatan	Peserta	Peran Perempuan	Alasan
6.	Lokakarya II di rumah P. Dartam, 7 Oktober 2002: identifikasi masalah; merumuskan tindakan pemecahan masalah; menentukan prioritas rencana	Tim Sembilan dan fasilitator desa	Terlibat dalam proses perumusan : pembuatan drainase, saluran air bersih, pengaspalan Jalan lapangan dan reboisasi, pembuatan talud, sarana MCK, rehab TK	Tugas Tim Sembilan; belajar, memenuhi kebutuhan masyarakat; dukungan masyarakat
7.	Lokakarya III di rumah B.Dinah, 16 Oktober 2002: Penentuan jenis kegiatan maks 2 (keterbatasan dana, kebutuhan masy); Penentuan lokasi	Tim Sembilan, dibantu oleh fasilitator desa, perangkat desa, BPD, dan LKMD	Terlibat dalam penentuan dua kegiatan P2MPD : rehab TK serta pengaspalan jalan lapangan dan reboisasi	Tugas Tim Sembilan; belajar, memenuhi kebutuhan masyarakat
8.	Penyusunan Proposal dan RAB	Tim Sembilan, fasilitator, Sekdes, BPD & LKMD. Dominasi Sekdes & fasilitator	Membantu serta belajar menyusun proposal dan RAB	Tugas Tim Sembilan dan belajar
9.	Pelaksanaan kegiatan : 1. Pengaspalan jalan lapangan dan reboisasi 2. Rehabilitasi TK	Mandor: laki-laki dan perempuan; Tukang: laki-laki; Pekerja: laki-laki dan perempuan.	Tim Sembilan : terlibat secara aktif dalam pelaksanaan Perempuan : ikut terlibat pada pelaksanaan kegiatan (rehab TK: dominasi laki-laki; pengaspalan: dominasi perempuan)	Peluang terlibat dalam program terbuka, kesempatan kerja terbuka, alasan ekonomi.
10.	Evaluasi Program	Tim Sembilan dibantu perangkat dan fasilitator desa	Berperan serta dalam kegiatan evaluasi	Tugas Tim Sembilan, belajar
11.	Pemanfaatan program	Masyarakat	Ikut merasakan kemudahan dan kenyamanan penggunaan jalan dan kebutuhan anak di TK	Kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan
12.	Pemeliharaan	Masyarakat melalui swadaya (iuran rutin PKK, kerigan, portal dan pemeliharaan)	Ikut serta dalam pemeliharaan, khususnya iuran rutin PKK	Kebutuhan akan TK dan prasarana desa lainnya

Sumber: Data primer dan sekunder diolah.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pemberdayaan Perempuan di Desa Tumiyang

Program P2MPD memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat dan perempuan, karena blue print program tersebut sedikit banyak telah mengimplementasikan aspek teoritis pemberdayaan masyarakat, yang setidaknya nampak pada: Pertama, sifat Program P2MPD, yakni participatory planning, monitoring and evaluation; Kedua, tujuan Program P2MPD, yakni bermaksud (a) mendukung upaya desentralisasi pemerintahan; (b) memberdayakan masyarakat kelurahan/desa untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah; (c) meningkatkan prosedur-prosedur transparansi, tata negara, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan pada tingkat kabupaten/kota; (d) mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan umum dasar; (e) menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat lokal; dan (f) meningkatkan fungsi prasarana dan sarana dasar; Ketiga, prinsip dasar Program P2MPD, yakni demokrasi, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas/dapat dipertanggungjawabkan, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, keterlibatan perempuan, kesinambungan, dan partisipasi masyarakat (Bappenas, 2001).

Berkenaan dengan prinsip

pemberdayaan, selanjutnya dalam Buku I Landasan PPME Dalam P2MPD dijelaskan bahwa prinsip pemberdayaan memberikan landasan bahwa setiap tahap kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi partisipatif dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan penduduk dan kelembagaan desa agar mereka mempunyai kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk mengelola sumberdaya desa. Dalam prinsip pemberdayaan P2MPD, termasuk di dalamnya pemberdayaan orang miskin dan pemberdayaan perempuan (halaman 11). Selanjutnya, dijelaskan bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kapasitas perempuan agar memiliki kompetensi untuk mengelola sumberdaya desa, dalam arti memiliki kompetensi untuk (a) terlibat dalam menentukan kebutuhan perbaikan penduduk dan kelembagaan desa; (b) berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan, dalam arti terlibat dalam pengambilan keputusan dan terwakili dalam setiap tahap kegiatan; (c) melakukan akses segala aspek kehidupan; (d) melakukan kontrol dalam arti pengendalian dirinya sendiri dan pengendalian masyarakat (halaman 12).

Berdasarkan penjelasan blue print program P2MPD di atas, setidaknya telah terdapat dua aspek penting pemberdayaan, yakni

mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan dan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintahan yang terdekat dengan kelompok sasaran (Vidhyandika Moeljarto, 1996).

Kedua aspek penting pemberdayaan tersebut setidaknya telah dilaksanakan pada implementasi program P2MPD di Desa Tumiyang. Hal tersebut, setidaknya terlihat pada tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Matriks 1 di atas. Akan tetapi, berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan tersebut, dapat diperoleh temuan-temuan yang bergayutan dengan upaya pemberdayaan perempuan.

1. Keharusan perempuan terlibat dalam Tim Sembilan. Kehadiran Ny. Sri Murdiningsih, Ny. Dasilah, Ny. Agus Indriyati, dan Ny. Kasiyah sedikit banyak karena keharusan dan “paksaan” dari pelaksana program. Keharusan ini, seberapa pun kecilnya merupakan bentuk pemaksaan kehadiran perempuan dalam Tim Sembilan. Hal ini kontradiktif dengan konsep kelompok sebagai media pemberdayaan; bahwa kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif; akan tetapi penting untuk menghindari pembentukan kelompok yang dipaksakan (Moeljarto, 1996).

2. Masih besarnya peran perangkat

desa dan pelaksana program (terutama fasilitator desa) dalam implementasi program. Sekretaris desa dan fasilitator desa sangat menonjol perannya selama pelaksanaan program P2MPD. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan Tim Sembilan, deadline program yang sudah harus selesai dalam jangka waktu tertentu, dan kepentingan pelaksana program maupun pemerintah. Selain itu, antara pemerintah daerah dan KMD belum ada kesepakatan hingga pelaksanaan program. Pemerintah kabupaten menghendaki 70% fisik dan 30% proses; sementara konsultan untuk community development KMD mengusulkan sebaliknya, namun Tim Leader KMD lebih sepakat dengan pemerintah kabupaten. Bergayutan dengan peran perangkat desa dan fasilitator desa, dalam pelaksanaan program P2MPD dapat disebut sebagai fungsi pendampingan terhadap kelompok sasaran atau masyarakat. Pendamping lokal dan pendamping khusus tersebut (Sumodiningrat, 1996), diharapkan menjadi pihak yang membantu kelompok untuk suatu masa tertentu dan diharapkan nantinya kelompok akan dapat berfungsi secara mandiri. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, harus tercipta keinginan saling belajar antara kelompok yang didampingi dan pendamping, tidak berperasaan bahwa yang

masyarakat akan daya yang mereka miliki (Chambers, 1988). Harapan fasilitator desa bisa melaksanakan fungsi pendamping secara maksimal terkendala oleh beban kerja fasilitator yang cukup berat karena harus mendampingi lebih dari tiga desa.

3. Program P2MPD lebih berorientasi pada aspek fisik (selengkapnya lihat Kerangka Acuan Lokakarya dan Laporan Pelaksanaan Tugas KMD, 2003). Hal yang sama terjadi pula di Desa Tumiyang, di mana kedua kegiatan yang dibutuhkan berupa pembangunan fisik. Sementara, pendidikan merupakan faktor kunci upaya pemberdayaan, yang harus ditunjang dan dilengkapi dengan pemberdayaan psikologi, sosial-budaya, ekonomi, dan politik (Priyono, 1996). Pendapat Priyono tersebut nampak berkait gelindang dengan kondisi perempuan di Desa Tumiyang. Berdasarkan Rekapitulasi Keluarga Miskin Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2000 (dalam BKKBN Kabupaten Banyumas, 2000), menunjukkan jumlah total KK di Desa Tumiyang sebanyak 351 KK, 153 KK di antaranya termasuk kategori miskin dan tiga KK masuk kategori miskin sekali (44,44% kategori keluarga miskin). Demikian halnya dengan kondisi tingkat pendidikan perempuan Desa Tumiyang, dari 590 penduduk perempuan, 294 orang belum/tidak tamat SD, 186 orang tamat SD/setara, 80 orang tamat SLTP/setara, 27 orang

tamat SLTA/setara, dan hanya tiga orang yang tamat pendidikan tinggi (DI/II). Sedangkan pendidikan tertinggi perempuan yang terlibat dalam Tim Sembilan adalah SLTP.

4. Kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program P2MPD.

Keempat hal di atas dapat dinyatakan sebagai penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan di Desa Tumiyang. Sedangkan faktor yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan yang ditemukan di desa tersebut adalah

1. Program P2MPD secara tegas menyatakan perlunya keterlibatan perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Ketegasan value atau nilai program yang sejak sosialisasi dinyatakan secara tegas oleh pelaksana program mampu mendorong partisipasi perempuan pada kegiatan Tim Sembilan maupun pelaksanaan program P2MPD. Hal tersebut dirasakan perbedaannya oleh perempuan apabila dibandingkan dengan program sebelumnya, yang lebih didominasi oleh laki-laki, seperti program air bersih dan P3DT.
2. Anggota perempuan Tim Sembilan menyadari keterbatasannya, sehingga mereka mau belajar pada setiap tahapan program. Sayangnya, proses belajar tersebut belum optimal.

analisis Longwe. Teknik Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau Kriteria Pembangunan Perempuan adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Handayani dan Sugiarti, 2002). Adapun profil gender selengkapnya dalam program P2MPD, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Profil Gender dalam Program P2MPD

Sektor	Proyek	Kesejahteraan	Akses	Penyadaran	Partisipasi	Kontrol
Pendidikan	Rehabilitasi TK	-	netral	+	+	+
Prasarana	Pengaspalan jln lapangan & reboisasi	-	netral	+	+	+

Sumber: Data primer diolah.

Nilai positif (+), negatif (-), dan netral pada tabel di atas menunjukkan derajat sensitivitas terhadap isu perempuan pada kedua proyek P2MPD di Desa Tumiyang. Meski lebih banyak nilai positif pada kedua proyek tersebut, satu catatan yang harus digarisbawahi adalah nilai positif tersebut lebih pada masuknya isu perempuan pada pelaksanaan program sehingga dampak lebih lanjut pada komunitas perempuan ataupun masyarakat pada umumnya masih perlu dikaji lebih lanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perempuan telah dilibatkan dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD.
2. Keterlibatan perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran perempuan akan tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Meski demikian, pada tahapan kegiatan berikutnya terlihat keterlibatan perempuan yang dilandasi atas

keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum optimal karena masih bersifat pasif.

3. Faktor pendukung upaya pemberdayaan perempuan: nilai pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan perempuan program P2MPD dan kemauan untuk belajar dari anggota Tim Sembilan. Sedangkan faktor penghambat adalah “pemaksaan” keterlibatan perempuan dalam program, masih besarnya peran sekretaris desa dan fasilitator desa, program P2MPD yang lebih berorientasi fisik, dan dukungan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chambers, R. 1988. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Penerjemah: Pepet Sudradjat, Cetakan ke-2, LP3ES, Jakarta.
- Handayani, Trisakti, dan Sugiarti. 2002. Konsep dan Teknik Penelitian Gender. UMM Press, Malang.
- Lincoln, Y. dan E.G. Guba. 1984. Naturalistic Inquiry. Sage Publications, Beverly Hills, London.
- Miles, B.M. dan A.M. Huberman. 1984. Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan), UI Press, Jakarta.
- Moeljarto, V. 1996. "Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT", dalam: Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Penyunting Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Moleong, L.J. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito, Bandung.
- Prijono, O.S. 1996. "Pemberdayaan Wanita sebagai Mitra Seajar Pria", dalam: Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Penyunting Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Yin, R.K. 1987. Case Study Research Design and Method. Sage Publications, London.

Dokumen:

- Buku I Landasan PPME Dalam P2MPD: Pendekatan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Partisipatif, Bappenas.
- Kerangka Acuan Kerja Lokakarya Evaluasi dan Perencanaan P2MPD di Kabupaten Banyumas.
- Makalah Lokakarya Program Pedukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah 2002-2003 Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, 2003.
- Pedoman Umum Program P2MPD, Deputi Bidang Regional dan Sumberdaya Alam Bappenas, 2001.